

## TEORI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

**TEORI** → ungkapan mengenai hubungan kausal (sebab akibat) yang logis diantara berbagai gejala/perubahan (variabel) dalam bidang tertentu (ex. Pembangunan) sehingga teori dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (frame of thinking) dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu (ex. Pembangunan)

Teori dapat dianggap batal/gagal karena tidak terbukti/teruji kebenarannya

Ex. Teori Darwin → manusia berasal dari manusia sejenis kera yang mengalami evolusi menjadi manusia modern

Agama/Keyakinan    **X**    Science/Empiris & logis

Agama → ukuran kebenarannya berdasarkan keyakinan

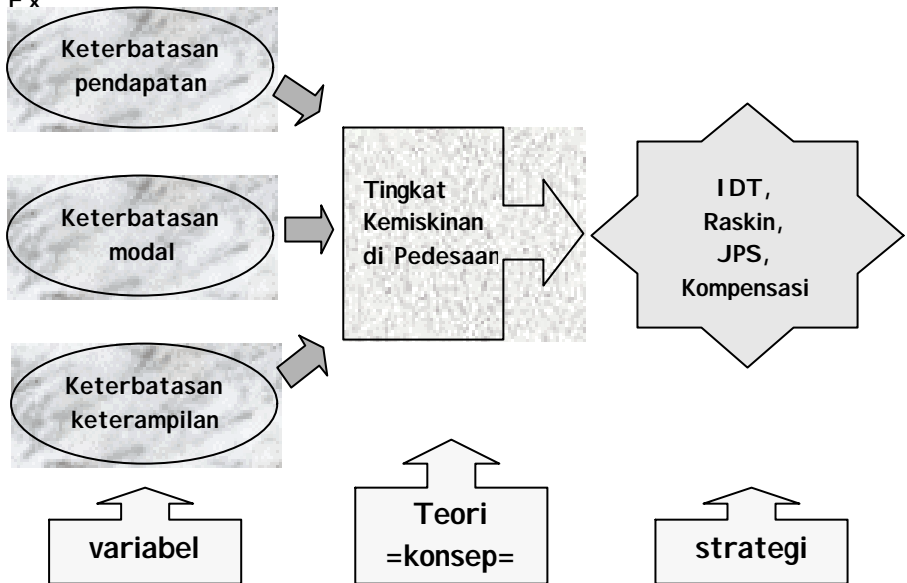
Science → ukuran kebenarannya berdasarkan empiris (ada bukti/nyata) dan logis (masuk akal)

**STRATEGI**: rangkaian kebijakan dan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan/memecahkan persoalan tertentu (ex. Kemiskinan)

**VARIABEL**: konsep yang mempunyai variasi nilai

## Hubungan Teori & Strategi

Fx



Ex.

- Spidol → konsep  
→ manakala menjadi "manfaat" spidol: untuk menulis etc.  
→ menjadi variabel
- Pendidikan  
→ manakala menjadi "jenis" pendidikan: formal, nonformal, informal  
→ menjadi variabel

## PENGERTIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

### Menurut PBB:

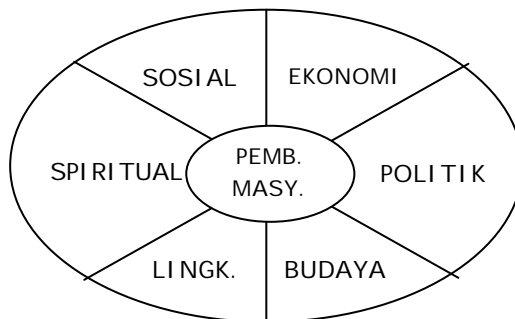
Pembangunan Masyarakat/Pembangunan Komunitas adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Pembangunan Masyarakat Desa = *Rural Community Development*  
Komunitas / *community* = masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah tertentu

### Menurut Sanders, PM dapat dipandang pada:

1. Proses
2. Program, ext. Raskin, BLT
3. Gerakan, ex. KB untuk pembatasan kelahiran
4. Metode

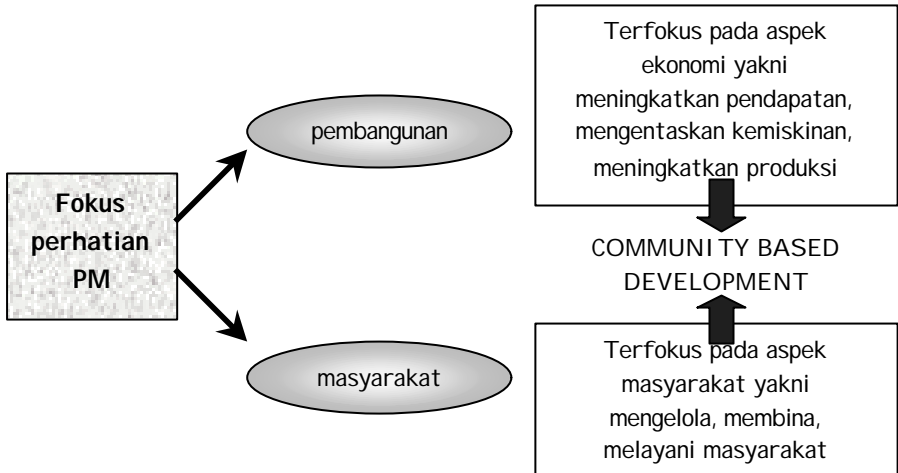
### Menurut Jim Ife: Enam Dimensi PM



PM dari aspek spiritual ex. Program kerja KKN dengan mengadakan pengajian di lokasi KKN

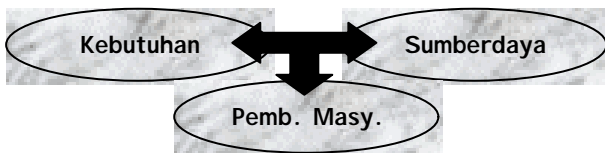
PM dari aspek lingkungan ex. Penanaman pohon dalam lingkup RW, kerja bakti pembersihan lingk. etc.

## Fokus Perhatian Pembangunan Masyarakat



### Menurut Soetomo:

PM adalah proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara NEEDS and RESOURCES melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun.



Ex. Daerah Kasongan mempunyai sumber daya berupa tanah liat, sedangkan di masyarakat dibuthkan produk gerabah. Berarti dalam hal ini terjadilah pembangunan masyarakat dari produksi tanah liat (gerabah) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

**Awal tahun 1951 PM** dimaknai sebagai pendidikan, karena dengan pendidikan diharapkan dapat terwujudnya pembangunan bagi masyarakat.

**Proses PM:**

1. Rendahnya modal finansial
2. Minimnya sarana infrastruktur (jalan, sarana transport)
3. Rendahnya kesadaran masyarakat (kedisiplinan kurang)
4. Rendahnya kualitas SDM
5. Rendahnya komunikasi, informasi dan koordinasi
6. Berkurangnya tokoh panutan (tokoh masyarakat)

**Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari:**

1. Terberantasnya pengangguran
2. Terberantasnya kemiskinan
  - ➔ Bank Dunia memberikan ukuran pendapatan minimal \$2 per hari per kepala
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Bacaan tambahan:

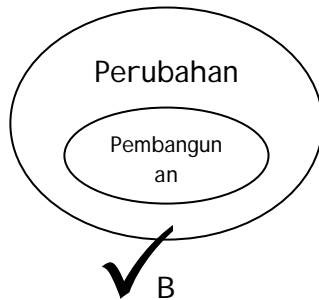
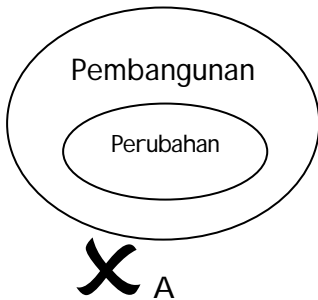
Kompas 12 November 2001: Tabel Utang Luar Negeri

Kompas 20 Februari 2005: mengenai Multinational Corporation

“Republik Kapling”

**Pengertian Pembangunan:**

- Pembangunan adalah proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik
- Tetapi tidak setiap perubahan dapat disebut pembangunan
- Maka diagram yang benar adalah:



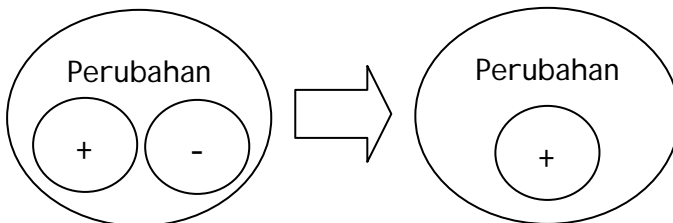
Penjelasan:

Perubahan { +  
-

Dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik atau ke arah positif  
→ disebut PEMBANGUNAN

Dari kondisi tertentu ke kondisi tidak baik atau ke arah negatif  
→ disebut PERUSAKAN, BENCANA, dll.

Jadi:





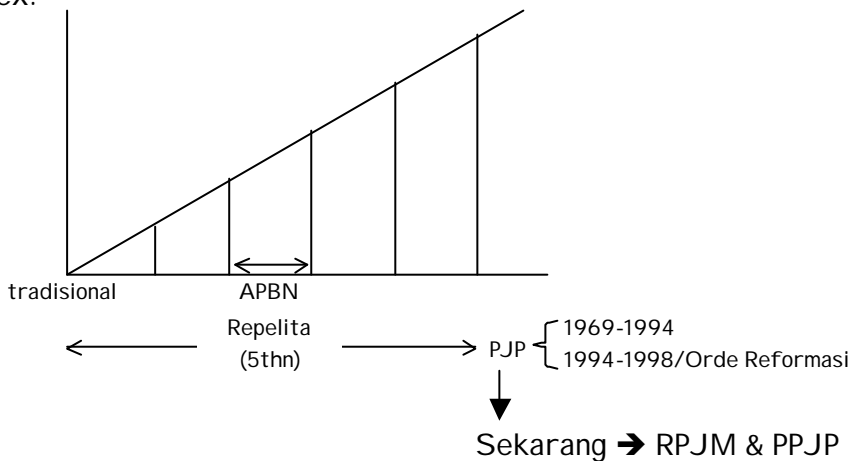
## TEORI PEMBANGUNAN

1. Teori Modernisasi
2. Teori Ketergantungan
3. Teori Pasca Ketergantungan
4. Teori Alternatif

### Teori Modernisasi

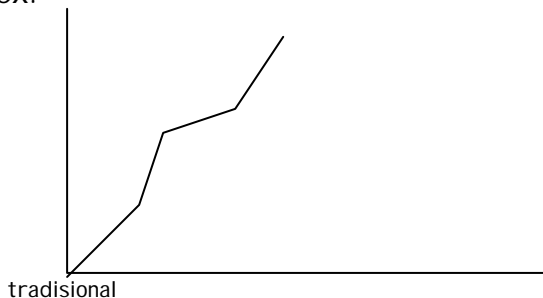
→ sebuah negara mengakui bahwa negara berjalan secara linear dari tradisional menuju kearah modernisasi

ex.



Tetapi, ada suatu negara yang arahnya seperti di bawah ini:

ex.



### Teori Ketergantungan

→ meyakini bahwa sebuah negara tidak akan lepas dari negara lain

### Teori Pasca Ketergantungan

→ negara yang kecil dimungkinkan lepas dari negara adidaya melejit sendiri

### Teori Alternatif

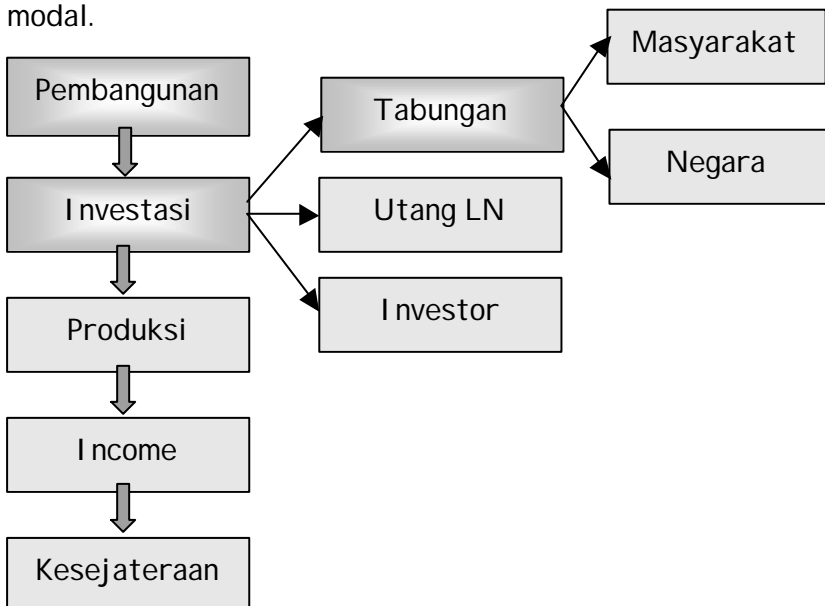
→ berharap negara-negara yang selama ini saling berkompetisi dalam hal persenjataan bergerak ma seakan-akan tidak ada perang

### Contoh-Contoh Teori Modernisasi

#### 1. Harrod Domar → menekankan aspek ekonomi

= Teori **TABUNGAN & INVESTASI**

→ menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi  
Pembangunan tidak lain adalah **investasi**/invest/penanaman modal.



Keterangan:

Dengan investasi maka menghasilkan produksi

Untuk bisa memproduksi diperlukan tenaga kerja

Dengan adanya produksi maka ada income/pendapatan

Income untuk tenaga kerja dan negara dalam bentuk pajak

Karena ada income maka ada kesejahteraan

Baca: Sragen → Birokrasi

Lembaga PMA → penanaman modal asing

PMDN → Penanaman modal dalam negeri

Pasca reformasi → krisis → terjadi capital flight

**Capital Flight** → larinya modal ke luar negeri. Modal tidak

ditanamkan di Indonesia tetapi di luar negeri

Disebabkan beberapa masalah:

- Buruh
  - banyak buruh yang tidak dibutuhkan
  - banyak buruh yang banyak tuntutan  
ex. SONY (Jepang) Maret 2004 hijrah ke Malaysia  
karena adanya permasalahan tersebut sehingga menjadi  
masalah bagi investor
- Perijinan
- Pungutan liar

Sehingga untuk memecahkan persoalan keterbelakangan pada negara-negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal dari dalam maupun luar melalui penanaman modal atau utang luar negeri.

Utang LN Indonesia dari 1969 s.d. 2001 dapat dilihat dalam Kompas 12 Nov 2001 hal. 8

Bahkan dalam rangka utang dibentuk konsorsium (Kompas, 9 Nov. 2001)

2. **David McClelland** → menekankan aspek psikologi individu  
= **DORONGAN BERPRESTASI**

= **n-ACH = NEED FOR ACHIEVEMENT**

→ bagi McClelland mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n-Ach-nya yang tinggi.

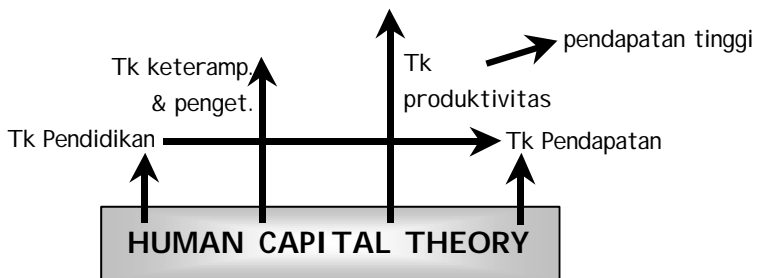
Ex. Yang duduk di kelas ini berorientasi untuk berprestasi

**Human capital theory:** semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan.

Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan

Dengan semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan maka semakin tinggi tingkat produktivitas

Dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang tinggi maka mendorong tingginya tingkat pendapatan



Tk. Pendidikan → Formal: SD, SMA, PT  
→ Non Formal: kursus jahit, masak,  
→ Informal: nonton TV, baca koran, diskusi,  
pendidikan keluarga

Dalam data monografi dinding biasanya tingkat pendidikan non formal dan informal tidak ada karena sulit untuk pendataan.

Formal: ada aturan yang ketat/jenjang

Nonformal: ex. pagi kursus rias, siang kursus jahit, malam kursus komputer, dsb. → bisa dilakukan bareng, tidak harus menunggu satu kursus selesai sampai lulus dulu

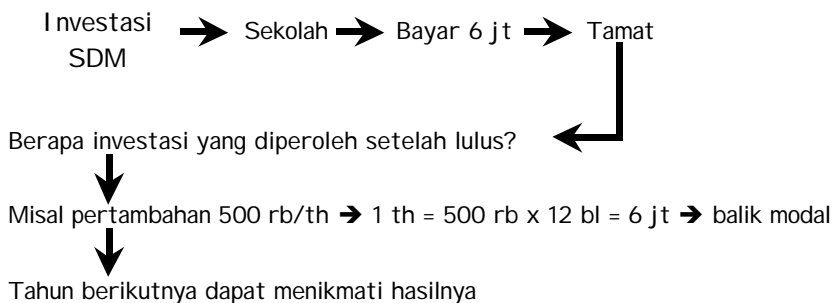
Informal: ex. belajar jahit sambil nonton TV

Kalau manusia wiraswasta ini dapat dibentuk dalam jumlah yang banyak, proses pembangunan dalam masyarakat tersebut akan menjadi kenyataan.

Ex. Norwegia → memiliki banyak lahan pertambangan  
Penduduknya disekolahkan (belajar, mencari ilmu pengetahuan), setelah selesai baru 'menambang'

Kesimpulan:

Cara pembentukannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan individual misalnya ketika mereka ini masih anak-anak di lingkungan keluarga



SDM ----- SDA  
↓

Lebih penting SDM ex.

- Singapura tidak punya tambang minyak, tetapi bisa mengolah minyak kemudian dijual jadi mahal.
- Tasbih Tulungagung dibawa ke Singapura diganti made in Singapore, kemudian dijual di Saudi Arabia, jadi mahal

### 3. Max Weber = ETIKA PROTESTAN

→ teori Weber tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme merupakan sumber aliran ini.

Apabila nilai-nilai yang hisup dalam masyarakat (agama) dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka proses pembangunan dalam masyarakat tersebut dapat terlaksana.

Agama + Ekonomi = Pembangunan

Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan oleh Calvin, mengatakan bahwa seseorang setelah mati akan masuk surga atau neraka. Tetapi manusia tidak mengetahui sehingga mereka menjadi tidak tenang, cemas karena ketidakjelasan nasibnya.

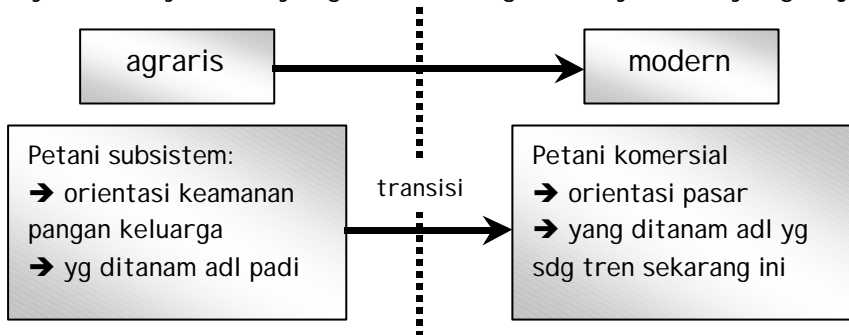
Indikatornya dapat dilihat pada saat hidup di dunia:

- jika seseorang sukses/berhasil di dunia → tanda-tanda masuk surga
- jika seseorang gagal di dunia → tanda-tanda masuk neraka

Dengan indikator tersebut maka pengikutnya belajar/berjuang untuk mencapai indikator masuk surga.

#### 4. Rostow = LIMA TAHAP PEMBANGUNAN

→ proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.



#### Lima tahap pembangunan:

1. Masyarakat Tradisional
2. Prakondisi untuk Lepas Landas
3. Lepas Landas
4. Bergerak ke Kedewasaan
5. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

#### 5. Bert F. Hoselitz = FAKTOR-FAKTOR NON EKONOMI

→ membahas faktor-faktor non ekonomi yang ditinggalkan Rostow yang disebut sebagai Faktor Kondisi Lingkungan yang dapat dicari dalam masyarakat ex. keterampilan tertentu  
→ menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas

#### 6. Alex Inkeles & David H. Smith = MANUSIA MODERN

→ menekankan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun.

## **BEBERAPA MODEL PEMBANGUNAN**

### **1. Model Pembangunan yang Berorientasi pada Pertumbuhan**

#### **→ ECONOMIC GROWTH**

→ yakni kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja.

Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

- a. akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM
- b. peningkatan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas
- c. kemajuan teknologi yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional

### **2. Model Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejahteraan**

#### **→ BASIC NEEDS**

→ Lahir dari prakarsa Gunnar Myrdall

Model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dll.

Perumahan → ex. KPR BTN

Pendidikan → ex. Wajib belajar 9 tahun → SD Inpres → (imbas dari top Down)

Kesehatan → ex. Puskesmas

Subsidi pemerintah

Disini peran pemerintah seperti SI NTERKLAS

Kelebihan:

- target terpenuhi
- target segera tercapai
- memecahkan masalah tanpa masalah

Kelemahan:

- pemerintah harus banyak uang
- masyarakat menjadi manja, tergantung, tidak mempunyai kreativitas ex. Menunggu bantuan

### 3. Model Pembangunan yang Berpusat pada Manusia

→ **PEOPLE CENTERED**

→ fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial.

Ex. Empowering/pemberdayaan

Peranan pemerintah → sebagai fasilitator

Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

Economic Growth → **trickle down effect: rembesan kemakmuran ke bawah**

Ex. Edi Tansil diberi privillage/fasilitas kredit atau keringanan pajak → setelah mencapai kemakmuran diharapkan luberan/tetesan/rembesan kemakmuran sampai ke bawah. (tetapi yang terjadi adalah investment flight)



### **With Redistribution**

→ pemrt. Soeharto → pengusaha dikumpulkan  
2% pendapatan dimasukkan Yayasan Kesejahteraan Mandiri  
dalam bentuk Takesra/Kukesra  
Di negara maju redistribusi melalui pajak progresive yang  
didistribusikan dalam bentuk santunan untuk masyarakat  
miskin.

**PERBEDAAN 3 model:**

<b>Karakteristik</b>	<b>Strategi</b>		
	<b>Economic Growth</b>	<b>Basic Needs</b>	<b>People Centered</b>
<b>Fokus</b>	Industri	Pelayanan Public Service	Manusia Empowering
<b>Nilai</b>	Berpusat pada industri	Berkiblat pada manusia	Berpusat pada manusia
<b>Indikator</b>	Ekonomi makro (pertumb.nya brp %)	Indikator sosial	Hub. manusia dg sumber daya
<b>Peran Pemerintah</b>	Entrepreneur	Service provider	Enabler/Facilitator
<b>Sumber Utama</b>	Modal (tab. masyarakat)	Kemampuan administratif & anggaran	Kreativitas & komitmen
<b>Kendala</b>	Konsentrai & marginalisasi • konsentrasi pada fasilitas beberapa konglomerat • dehumanisasi: tidak memanusiakan manusia	Keterbatasan anggaran & inkompetensi aparat	Struktur & prosedur yg mendukung

## **UKURAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN (Dudley Seers)**

### 1. Berkurangnya Kemiskinan

Miskin (Sayogyo): kemiskinan diukur dari jumlah pendapatan setara dengan beras

- paling miskin bila pendapatan perkapita pertahun setara beras < 240 kg
- miskin sekali bila pendapatan perkapita pertahun setara beras = 240 – 360 kg
- miskin bila pendapatan perkapita pertahun setara beras : < 480 kg  
ex. 480 kg X 5.000,- = 2.400.000,-/th per kepala

ex.

Pendapatan per bulan 175.000,-

Harga beras 3.500

Miskin atau tidak?

$175.000 : 3.500 = 50 \text{ kg./bulan}$

$50 \text{ kg} \times 12 \text{ bln.} = 600 \text{ kg./th}$

Jawab → tidak miskin

### 2. Berkurangnya Pengangguran

### 3. Berkurangnya Ketimpangan

## KONGLOMERASI

→ agregat dalam tanah

→ konglomerat tetapi group

→ ex. Jakob Utama pemilik Kompas,

- setiap hari butuh kertas → dibangun pabrik kertas
- perlu percetakan → didirikan percetakan
- wartawannya kalau sedang meliput ke luar kota butuh penginapan → dibangun Hotel Santika
- pemasaran terbitan → Toko Buku Gramedia

Dampak:

(-) dari hulu sampai hilir dikuasai 1 orang (kekayaan diakumulasi oleh 1 orang)

(+) merekrut tenaga kerja

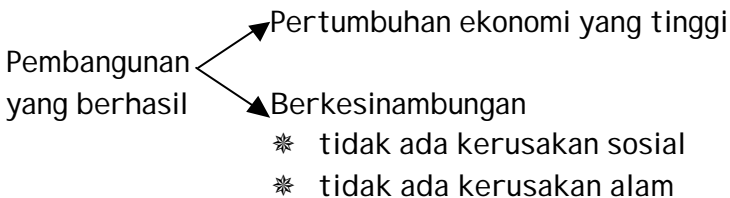
Ketimpangan:

Antara Jakarta ===== Jogja

Antara Papua ===== Jakarta

Dst.

## Keberhasilan pembangunan (Arief Budiman)



KCM, Senin, 14 Februari 2005

## *Republik Kapling*

**Oleh Tamrin Amal Tomagola**

PARA nasionalis-fanatik Indonesia, khususnya mereka yang mengacu pada paham state nationalism, cenderung dengan mata mendelik mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai wujud final yang haram untuk ditawar, baik sebagai sekadar gagasan maupun dalam gerakan separatis secara damai, apalagi bersenjata.

Sambil menabuh genderang perang terhadap setiap gerakan pemecah belah, khususnya para separatis dan aktivis LSM yang dinilai tidak nasionalis-almarhum Munir misalnya-mereka terus berilusi bahwa tubuh Ibu Pertiwi NKRI itu masih utuh.

### **Maraknya pengaplingan**

Mereka cenderung menutup mata terhadap kenyataan yang telah mulai mengeras sejak masa Orde Baru bahwa sesungguhnya setiap jengkal dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling ekonomi-politik. Ukuran kapling-kapling itu bervariasi sesuai dengan skala modal yang ditanam dan jumlah upeti yang diselundupkan ke rekening pejabat negara dan daerah serta para anggota DPR pusat dan daerah.

*Bukit-bukit Timika untuk Freeport, Lhok Seumawe untuk Exxon Mobil, beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan untuk Monsanto, Buyat-Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont International, Teluk Bintun di Papua Barat untuk British Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal, hutan Papua untuk sejumlah jenderal pensiunan. Bahkan, Pulau Dewata kebanggaan Indonesia di Bali nyaris menjadi negara bagian ke-9 Australia. Semakin banyak usaha ekonomi-kesenian skala menengah dan besar di Bali dan Jepara, Jawa Tengah, berpindah tangan ke pemodal asing. Satu-satunya Taman Burung di Bali pun berada di tangan pemodal asing.*

Tidak hanya tubuh Ibu Pertiwi yang sudah centang-perenang dikapling, birokrasi negara-sipil dan militer-baik pada tingkat nasional dan daerah sudah lama tercabik-cabik dikapling-kapling oleh berbagai satuan mafia birokrat dengan sistem sel berjenjang yang rumit merata di seluruh Nusantara tanpa kecuali. Bila Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, serta Ditjen Anggaran Depkeu belum telanjur diduduki oleh satuan-satuan tikus berseragam, kita masih dapat berharap bahwa pajak yang dibayar oleh perusahaan asing maupun nasional masih dapat diselamatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

Bila di departemen yang dulu bernama Pekerjaan Umum (PU) juga sunyi dari pemalak-pemalak berseragam, maka kita masih dapat berharap bahwa jalan-jalan tidak berlubang-lubang. Bila di Departemen Perhubungan tidak terjadi pengaplingan proyek, maka kita tentu saja layak bermimpi punya pelabuhan-pelabuhan-darat, laut, udara, dan sungai-yang mampu beroperasi lebih lama dari seumur jagung. Bila Departemen Pendidikan Nasional mampu menghentikan lagu lama Love Me Tender tentu saja anak-anak dapat diselamatkan dari kebingungan gonta-ganti buku pelajaran dan pemaksaan ujian nasional yang beruang 45 miliar rupiah

Dan yang paling tragis adalah Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya di daerah-daerah di mana dana pengungsi bermiliar rupiah ludes tanpa dapat dilacak. Di wilayah konflik dan bencana malah dana-dana itu dipakai untuk tim sukses meraih suatu jabatan tertentu seperti yang dilaporkan Sdr Arianto Sangaji dalam tulisannya berjudul "Proyek Kekerasan di Sulawesi Tengah" (Kompas, 14/12/2004). Begitu haus dan rakusnya para pejabat sipil adigang-adigung ini melahap semua lahan-lahan finansial ini sampai-sampai lapangan parkir, termasuk di kampus-kampus (sic!) telah dikapling-kapling.

Aparat penegak hukum dan keamanan juga tidak mau ketinggalan dalam pesta nasional mengkapling-kapling bumi pertiwi dan birokrasi negara serta daerah. Setiap perempatan jalan dan tempat-tempat hiburan di kota-kota serta pangkalan ojek secara teratur mempersembahkan upeti dalam jumlah berkali-kali lipat gaji seorang kepala polres. Suatu perkara dapat ditelantarkan bertahun-tahun tanpa kabar (kasus pembobolan BNI misalnya) bila ada intervensi kekuasaan uang atau politik-administratif. Lembaga Kejaksaan, menurut seorang pengamat kepolisian, malah jauh lebih parah dalam memeras para tersangka. Porsi upeti sebanding dengan

luasnya kapling otoritas jaksa tertentu. Para hakim juga setali tiga uang dengan rekan-rekan mereka di Kejaksaan. Beberapa faksi militer menjadi pelindung dan bahkan pelaku dalam illegal logging, pencurian ikan laut, perkebunan, dan perdagangan ganja. Keamanan menjadi komoditas yang dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga para aparat keamanan selalu tampil sebagai pahlawan pengawal dan pembela NKRI dan penjamin keamanan rakyat. Dalam kenyataannya, mereka lebih sibuk menjaga keamanan kapling-kapling satuan kepentingan, baik finansial maupun promosi kenaikan pangkat mereka sendiri.

### **Negara semakin impoten**

Keadaan NKRI yang sudah sedemikian dikeroposi dan digembosi dari dalam oleh aparat birokrasinya sendiri nyaris memustahilkan efektifnya pelaksanaan setiap kebijakan maupun perangkat perundang-undangan yang ada. Bagaimana bisa suatu kebijakan nasional ditegakkan bila daftar isi dokumen kebijakan (Propenas misalnya) juga sudah dikapling-kapling. Bab sekian untuk departemen A. Subbab sekian sampai sekian untuk Ditjen A1, sedangkan subbab sisanya untuk Ditjen A2 dan A3.

Adalah menarik menyaksikan bagaimana para wakil setiap bagian dari birokrasi itu berdebat berjam-jam tentang penggunaan istilah tertentu. Ternyata tiap istilah yang digunakan punya implikasi di bagian mana sebuah proyek berikut dananya akan dialokasikan. Belum lagi bila bagian birokrasi tertentu harus berhadapan baik dengan aparat Ditjen Anggaran, Depkeu, maupun Bappenas dalam suatu dagang sapi proyek yang sangat merendahkan martabat bangsa.

Pengeroposan negara ini dari dalam tubuh birokrasinya sendiri adalah sebab utama dan pertama mengapa gonta-ganti presiden lima kali dalam enam tahun terakhir tidak membawa perubahan apa-apa dibandingkan dengan Thailand yang satu kali pergantian perdana menteri telah banyak mengubah nasib rakyat kecilnya (*The Economist*, 5/2/2005).

Sebab kedua semakin impotennya negara adalah semakin berjalinkelindannya keterkaitan berbagai masalah nasional dengan setumpuk faktor-faktor penyebab yang berada di lingkup tataran regional bahkan global. Masalah-masalah utama dan mendasar, seperti masalah perdagangan narkoba, perdagangan teknologi radioaktif dan nuklir, kerusakan lingkungan, perdagangan senjata, perdagangan anak dan

perempuan, tenaga kerja tak berdokumen, pencucian uang, dan terorisme semakin mustahil diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh tiap negara. Diperlukan sistem dan mekanisme regional seperti ASEAN dan sejenisnya untuk menangani hal-hal tersebut di atas. Otoritas dan wewenang bahkan kedaulatan suatu negara nyaris menjadi klaim-klaim usang yang perlu ditinjau kembali secara komprehensif.

Faktor ketiga yang semakin membuat kemampuan negara menangani masalah mendekati titik nadir ini adalah gencarnya proses desentralisasi sebagai dampak bawaan yang tak terhindarkan dari tuntutan demokratisasi. Daerah-daerah otonom semakin asertif menarik garis batas pembagian kekuasaan politik-administratif serta anggaran antara pusat dan daerah. Hal ini diperparah dengan semakin merajalelanya keserakahan aparat birokrasi berwatak Orde Baru yang mulai mengkapling-kapling berbagai lahan dana anggaran potensial. Lebih jauh, beberapa pemerintah kota besar dan menengah malah mulai merintis kerja sama regional dan internasional dengan melangkahi pemerintah nasional.

Hasil akhir dari gempuran tiga faktor pelemah negara-bangsa ini adalah pada satu pihak pemerintah pusat tidak mampu menangani masalah-masalah yang berdimensi regional-terkini, TKI tak berdokumen di Malaysia-di lain pihak pemerintah pusat juga tidak berdaya memberikan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Alhasil, seperti dirumuskan oleh Manuel Castells dalam karyanya *The Power of Identity* (1997:273): "...national governments in the Information Age are too small to handle global forces, yet too big to manage people's lives".

**Tamrin Amal Tomagola** *Sosiolog*

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/14/opini/1553516.htm>

Download: Kamis, 8 Juni 2006

Teori Pembangunan Masyarakat  
Dosen: Suharyanto